

PERAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI JEPANG-INDIA 2025 SEBAGAI SOLUSI KEKURANGAN TENAGA KERJA DI JEPANG

Burhan Jandu Alkausyar¹, Naura Cinta Darjono², Rahmi Erwin^{3*}

¹⁻³*Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sahid*

Email Korespondensi: rahmierwin006@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Konferensi Tingkat Tinggi Jepang-India 2025 sebagai salah satu respons utama Jepang terhadap krisis demografi berupa penurunan angka kelahiran dan peningkatan populasi lansia yang memicu kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor strategis. Melalui kesepakatan pertukaran hingga 500.000 orang dan penempatan sekitar 50.000 tenaga terampil India, kerja sama ini diposisikan untuk menopang kebutuhan ekonomi dan struktur pasar kerja Jepang di tengah perubahan komposisi penduduk. Dengan menggunakan perspektif sosiologi, khususnya terkait homogenitas budaya dan integrasi sosial, tulisan ini menganalisis bagaimana ideologi *tan'itsu minzoku*, narasi "*Japanese First*", serta konsep *tabunka kyousei* membentuk penerimaan dan resistensi masyarakat terhadap masuknya pekerja asing, terutama dari India. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisa sosial-budaya, kebijakan imigrasi, serta pandangan buruk masyarakat Jepang terhadap imigran India. Hasil kajian menunjukkan bahwa KTT Jepang-India 2025 berada di persimpangan antara kebutuhan ekonomi yang mendesak dan ketegangan sosial-budaya, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat Jepang mengelola dampak demografis, memperbaiki mekanisme integrasi sosial, dan menegosiasikan ulang identitas kolektif di tengah meningkatnya keberagaman.

Kata Kunci: Konferensi Tingkat Tinggi Jepang-India 2025, Demografi, Sosiologi, Homogenitas Budaya.

ABSTRACT

This study examines the Japan-India 2025 Summit as one of Japan's main responses to the demographic crisis in the form of declining birth rates and an increase in the elderly population that triggers labor shortages in various strategic sectors. Through an exchange agreement of up to 500,000 people and the placement of around 50,000 Indian skilled workers, the cooperation is positioned to sustain the economic needs and structure of Japan's labor market amid changing population composition. Using a sociological perspective, particularly related to cultural homogeneity and social integration, this paper analyzes how the ideology of *tan'itsu minzoku*, the "*Japanese First*" narrative, and the concept of *tabunka kyousei* shape society's acceptance and resistance to the entry of foreign workers, especially from India. This paper uses a normative method by analyzing socio-cultural, immigration policies, and Japanese people's bad views of Indian immigrants. The results show that the 2025 Japan-India Summit is at the intersection of urgent economic needs and socio-cultural tensions, so its success is largely determined by the ability of the Japanese state and society to manage demographic impacts, improve social integration mechanisms, and renegotiate collective identities amid increasing diversity.

Keywords: Japan-India Summit 2025, Demography, Sociology, Cultural Homogeneity

PENDAHULUAN

Jepang menghadapi krisis demografi yang semakin mendesak, ditandai dengan penuaan penduduk secara masif dan tingkat kelahiran yang terus menurun, yang berdampak langsung pada kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor vital seperti manufaktur, pertanian, perawatan kesehatan, dan teknologi informasi. Pada tahun 2024, Jepang mengalami penurunan populasi lebih dari 900.000 jiwa, hal ini merupakan penurunan terbesar sejak 1968, dengan angka kematian mencapai lebih dari 1 juta jiwa yang dimana melebihi angka kelahiran yaitu 700.000 jiwa. Proyeksi demografis menunjukkan bahwa pada 2025, rasio ketergantungan (penduduk lansia terhadap usia kerja) akan mencapai 50%, membebani sistem ekonomi dan sosial negara tersebut. Hal ini tidak hanya mengancam pertumbuhan ekonomi Jepang, dimana tenaga kerja bergantung pada tenaga kerja muda dan produktif, tetapi juga memberikan tekanan layanan publik seperti pensiun dan perawatan kesehatan, dimana permintaan tenaga kerja meningkat hingga 20% di sektor perawatan lansia saja (Kompas.com, 2025).

Pemerintah Jepang telah membuat solusi strategis untuk mengisi kekosongan tenaga kerja tersebut yaitu program *Specified Skilled Worker* (SSW) dan inisiatif pertukaran sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya terbaru adalah kesepakatan bilateral antara Jepang dan India yang diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tahunan Jepang-India 2025 di Tokyo pada 29-30 Agustus 2025. Kesepakatan ini menargetkan pertukaran lebih dari 500.000 orang secara dua arah dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada 50.000 tenaga terampil India terutama di bidang IT, akademik, industri, dan pemerintahan yang akan bekerja di Jepang. Inisiatif ini dirancang untuk memanfaatkan dinamisme demografis dan keahlian India, yang memiliki populasi muda lebih dari 1,4 miliar jiwa, guna mendukung sektor teknologi Jepang yang mengalami kekurangan kronis tenaga ahli. Selain India, Jepang juga mempertimbangkan peningkatan impor tenaga kerja dari negara-negara Afrika dan Asia lainnya, meskipun prioritas utama tetap pada mitra strategis seperti India untuk memperkuat kolaborasi pendidikan dan penelitian Bersama (CNBC Indonesia, 2025).

Walaupun begitu, hasil kesepakatan KTT Jepang-India 2025 yang dapat menjadi Solusi kekurangan tenaga kerja di Jepang, justru dinilai buruk oleh masyarakatnya sendiri karena secara historis Jepang dikenal dengan homogenitas etnis dan nilai-nilai nasional yang kuat. Kebijakan ini, telah memprovokasi perdebatan publik sengit, dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota Jepang yang menolak kedatangan imigran India dalam jumlah besar. Kekhawatiran utama mencakup potensi hilangnya identitas budaya Jepang, peningkatan risiko keamanan sosial, dan kesulitan integrasi akibat perbedaan bahasa, adat istiadat, serta etos kerja (Garap Media, 2025).

Dinamika kebijakan migrasi di Jepang, dari sudut pandang sosiologi, melibatkan interaksi kompleks antara hukum formal (regulasi visa, kesepakatan bilateral) dan norma sosial-budaya masyarakat. Kebijakan negara tidak sepenuhnya mampu untuk menghadapi resistensi publik terhadap masuknya tenaga kerja India dalam jumlah besar. Tantangan meliputi perlindungan hak pekerja (upah, jaminan sosial, pencegahan eksploitasi) yang kerap tidak sejalan antara peraturan dan praktik lapangan. Di tengah globalisasi, Jepang wajib menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dan pelestarian kohesi sosial, misalnya lewat pendidikan bahasa Jepang serta pertukaran budaya untuk tenaga kerja India (Yong, 2018). Penelitian ini menjadi krusial untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana migrasi internasional, khususnya dari India, dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi krisis tenaga kerja di Jepang, bersamaan dengan upaya

mengatasi resistensi sosial melalui implementasi program SSW dan tindak lanjut hasil kesepakatan KTT Jepang-India 2025 yang responsif dalam nilai-nilai lokal masyarakat Jepang. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada diskursus global tentang integrasi migran di negara-negara maju dengan dinamika demografis serupa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai fenomena sosial-budaya, kebijakan migrasi, serta dinamika persepsi masyarakat terhadap kedatangan tenaga kerja India di Jepang. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dan studi Pustaka yang diperoleh dari laporan media nasional-internasional, hasil survey ISSP, serta hasil penelitian akademis terkait migrasi. Pendekatan kualitatif-deskriptif sangat sesuai untuk mengkaji isu-isu yang menuntut eksplorasi makna, proses, dan interaksi sosial yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik semata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konferensi Tingkat Tinggi Jepang-India 2025 Sebagai Solusi Kurangnya Tenaga Kerja di Jepang

Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disebut KTT) Jepang-India 2025 diselenggarakan pada 29-30 Agustus di Tokyo, Jepang. KTT ini dihadiri oleh Perdana Menteri masing-masing negara yaitu, Narendra Modi (India) dan Shigeru Ishiba (Jepang). KTT ini menyepakati berbagai hal, mulai dari investasi nilai besar, aliansi pertahanan, hingga pertukaran warga dalam skala besar. Dalam kesepakatan pertukaran Sumber Daya Manusia (SDM) oleh kedua negara menargetkan 500.000 orang secara dua arah, termasuk 50.000 tenaga terampil dan talenta potensial India yang akan bekerja di Jepang (CNBC Indonesia, 2025)

Kondisi Kekurangan Tenaga Kerja di Jepang: Penyebab dan Sektor Terdampak

Kekurangan tenaga kerja di Jepang terutama disebabkan oleh penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran, yang mengakibatkan rasio ketergantungan penduduk usia kerja mencapai 50% pada 2025. Faktor ini diperburuk oleh tingkat pengangguran rendah (2,4% pada September 2024), yang justru menunjukkan permintaan pekerjaan melebihi pasokan, dengan survei Reuters Januari 2025 mengungkapkan bahwa dua pertiga perusahaan terdampak parah. Sektor non-manufaktur seperti layanan informasi (kekurangan teknisi sistem), konstruksi, restoran, dan penyedia tenaga kerja paling terpukul, di mana 53,4% perusahaan melaporkan kekurangan staf penuh waktu terparah sejak pandemi COVID-19 (Pratama, 2025)

Dalam hal ini, demografi bukan hanya perhitungan angka penduduk melainkan sebagai peristiwa sosial yang dapat dipengaruhi struktur dan nilai sosial. Umumnya penduduk Jepang lebih memilih tidak menikah hal ini dikarenakan urusan mengenai cinta atau pernikahan itu sendiri merupakan hubungan yang rumit bahkan dinilai membatasi kebebasan seseorang, lalu ada biaya hidup yang tinggi serta tekanan akibat budaya kerja di Jepang. peristiwa ini merupakan suatu pergeseran struktur dan nilai sosial negara itu sendiri yang dimana pernikahan atau memiliki anak bukan lagi prioritas generasi muda sehingga munculnya hal tersebut dan meningkatnya gaya hidup individualistik akibat tingginya etos kerja di Jepang (Kirana *et al.* 2017).

Dampak Ekonomi dan Produktivitas Negara Jepang

Hasil KTT Jepang-India 2025 memberikan dampak positif signifikan terhadap stabilitas ekonomi Jepang dengan menjaga produktivitas nasional di tengah penurunan populasi usia kerja, di mana pekerja asing diharapkan berkontribusi atas kekurangan tenaga kerja yang anjlok saat ini. Secara spesifik, kedatangan tenaga kerja India telah mencegah stagnasi di sektor manufaktur dan layanan, dimana hal tersebut lah yang paling dibutuhkan karena program *Specified Skilled Worker* (selanjutnya disebut SSW) ada untuk mengisi sektor Kesehatan dan perawatan lansia, Konstruksi, Perhotelan, Pertanian, Perikanan (Mekari Community, 2025). SSW merupakan program utama, yang memungkinkan pekerja asing dengan keterampilan menengah bekerja hingga lima tahun di 16 sektor kekurangan tenaga kerja, serta perluasan visa untuk talenta terampil di IT dan manufaktur. Strategi ini melibatkan kerjasama bilateral, seperti peningkatan upah (68,1% perusahaan berencana menaikkan gaji pada 2025) dan pelatihan bahasa Jepang untuk memfasilitasi adaptasi (Suara Surabaya, 2025).

Melalui kesepakatan pada KTT Jepang-India 2025, dampak ini terlihat jelas melalui potensi kolaborasi di sektor teknologi, di mana 50.000 pekerja India dapat mengisi kekurangan ahli digital dan mendukung demografi penduduk sebagai jawaban atas krisis Jepang. Namun, manfaat ini juga menimbulkan ketegangan, karena peningkatan produktivitas sering kali disertai narasi media tentang "ulah" imigran India, yang justru mengancam stabilitas sosial jangka panjang. Secara keseluruhan, migrasi ini memperpanjang usia pensiun dan investasi SDM, memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan meskipun dengan biaya adaptasi budaya (Haryono, 2025)

Integrasi Tenaga Kerja India Melalui Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Jepang-India 2025 dan Program Pemerintah Jepang

Program pemerintah Jepang yaitu SSW, tidak hanya mengatur akses kerja tetapi juga norma inklusi melalui ketentuan pelatihan bahasa dan hak sosial (Fauzan dan Paramasatya, 2022). Program ini mendukung integrasi dengan mewajibkan perusahaan menyediakan dukungan adaptasi, seperti akses jaminan sosial dan pencegahan eksploitasi, yang secara teoretis mengurangi marginalisasi migran sesuai prinsip keadilan sosial Durkheim. Namun, efektivitasnya tergantung pada penerimaan masyarakat, di mana hukum formal sering bertabrakan dengan norma budaya homogen Jepang (Herzog, 2018).

Hubungan ini semakin kompleks dengan tenaga kerja India, di mana KTT Jepang-India 2025 mengintegrasikan elemen hukum seperti visa khusus IT dan program pertukaran budaya untuk memfasilitasi adaptasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi ketegangan dengan memperkuat mekanisme anti-diskriminasi, tetapi kegagalan implementasi seperti kurangnya pengawasan membuat tenaga kerja India dipandang buruk, sebagaimana terlihat dalam demo tolak imigran India. Dengan demikian, hasil KTT dan program pemerintah Jepang berperan sebagai alat transformasi sosial, yang memfasilitasi integrasi melalui kolaborasi antar negara, walaupun tantangan resistensi budaya tetap menjadi hambatan utama (経済産業省, 2025).

Konsep Homogenitas Masyarakat Jepang dan Resistensi terhadap Perbedaan Etnis

Meskipun kerja sama antara Jepang dengan India memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi Jepang, kehadiran pekerja asing khususnya dari India dalam jumlah besar telah memicu resistensi sosial yang kompleks. Pandangan buruk ini berakar pada nilai-

nilai budaya homogen Jepang, kekhawatiran terhadap perubahan identitas nasional, serta ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan norma antara komunitas India dan masyarakat Jepang (Morgan *et al.* 2023).

Masyarakat Jepang secara historis dikenal dengan ideologi homogenitas etnis (*tan'itsu minzoku*) yang tertanam dalam Nihonjinron, pandangan bahwa masyarakat Jepang adalah ras tunggal dengan keunikan budaya yang khas dan orientasi kelompok yang kuat. Kepercayaan ini menciptakan batasan jelas antara "kami" (*Nihonjin* atau orang Jepang) dan "mereka" (orang luar atau *gaijin*), yang menyebabkan resistensi mayoritas masyarakat terhadap penerimaan tenaga kerja asing (Burgess, 2007). Teori pasar kerja ganda (*dual labour market theory*) menjadi relevan dalam konteks ini karena imigran bekerja dalam sektor sekunder yang berbanding terbalik dengan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial terutama diskriminasi (Michael Piore, 1970; Socio Health, 2024).

Para demonstran mengibarkan spanduk bertuliskan "Akhir Imigrasi Massal" dan "Lindungi Rakyat Jepang," yang dipimpin oleh partai sayap kanan Sanseito dengan slogan "*Japanese First*". Gerakan ini berhasil memperbesar kursi parlemen dari 2 menjadi 15 di Dewan Tinggi pada pemilu Juli 2025, dengan agenda utama menolak peningkatan imigran India dan menegaskan prioritas warga Jepang. Partai ini memanfaatkan narasi bahwa kedatangan imigran India dalam jumlah besar mengancam homogenitas budaya (BBC News Indonesia, 2025).

Fenomena ini dijelaskan oleh teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1979), di mana individu membentuk rasa aman melalui afiliasi dengan kelompok sosialnya, dalam hal ini, identitas kolektif sebagai "orang Jepang" dan merespons ancaman terhadap identitas tersebut dengan reaksi defensif seperti penghindaran sosial atau protes eksplisit. Survei ISSP terbaru menunjukkan bahwa 71,7% responden Jepang setuju bahwa "imigran meningkatkan angka kejahatan," naik signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan *cultural threat perception* perasaan bahwa tatanan sosial mereka terancam oleh nilai-nilai asing (Wibisono dan Sasia, 2020).

Perubahan Sosial Masyarakat Jepang Terhadap Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Jepang-India 2025

Seperti yang telah dijelaskan, masyarakat Jepang sangat mempertahankan etnis mereka dan membangun batasan yang sangat jelas terhadap warga asing. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan karena mereka takut akan berbagai hal yang terjadi apabila imigran dalam jumlah besar masuk ke negara mereka (lingkungan sosial), walaupun ketakutan ini merupakan ketakutan yang tidak berdasar (tapi dipercaya). Ketakutan tersebut membuat masyarakat Jepang melihat imigran sebagai ancaman identitas dan budaya daripada ekonomi (Japan Workers, 2025).

Dalam bersosialisasi antara warga asing dan lokal memiliki kendala yang sama yaitu budaya dan bahasa, kendala ini tidak dapat dihindari lantaran adaptasi memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dalam budaya kerja Jepang, ada konsep "*wa*" (和) = harmoni kelompok, Ini adalah nilai tertinggi. Individu harus mengalah demi kelompok, tidak boleh menonjol atau berbeda. Hal ini menimbulkan masalah lantaran warga asing dianggap mengganggu harmoni karena perbedaan bahasa, budaya, etos kerja, dan etnis yang membuat interaksi sosial menjadi tidak lancar (Geinokai BIJ, 2024).

Masyarakat Jepang tidak mengenal konsep integrasi seperti negara Barat (di mana migran dapat mempertahankan identitas bersamaan menjadi warga negara). Mereka punya konsep "*Tabunka Kyousei*" (hidup berdampingan multikultural). Konsep ini

menghargai perbedaan budaya akan tetapi perlindungan hak dan pengangkatan kelembagaan tidak selalu dilibatkan serta kohesi minoritas yang dituntut harus mengikuti norma-norma mayoritas. Jadi, ancaman sosial utamanya bukan pada migrannya sendiri, tetapi pada relasi sosial antara warga Jepang dan pendatang ketika jumlah orang asing naik sementara cara mengelola keberagaman masih lemah (Ishimatsu, 2025).

Demonstrasi masyarakat Jepang bukan lagi sekedar unjuk rasa melainkan suatu diskriminasi secara terang-terangan yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya warga Jepang terbaik dan imigran asing buruk. Sehingga mereka membenarkan perbuatan diskriminasi dan pengucilan sebagai pelindung terhadap warga asing. Dampak yang timbul dari hal ini jelas adalah ketakutan, ketakutan akan keselamatan mereka yang tidak dapat terjamin selama unjuk rasa dan kampanye berjalan. Banyak keluhan dari warga negara asing yang dimana mereka khawatir untuk melakukan aktivitas di lingkungan publik ataupun saat memesan sesuatu melalui telepon (Kompas id, 2025).

Berbagai permasalahan pada penjelasan sebelumnya tentu saja memberikan dampak pada tenaga kerja india di negara Jepang, seperti terbentuknya kelas sosial diantara para pekerja. Hal ini dikarenakan Jepang membuka 2 jalur yaitu SSW dan *digital partnership 2.0*, yang tentunya memiliki perbedaan mulai dari upah, fasilitas, status sosial, dll (経済産業省, 2025). Terdapat komunitas mandiri bernama *Nishi-Kasai*, dikenal sebagai "*Little India*" di Tokyo yang merupakan hasil dari tidak sempurnanya asimilasi antara tenaga kerja India dengan masyarakat lokal. Kawasan ini menampung sekitar 40% populasi India di Tokyo. Ini adalah contoh peristiwa sosial dari *bonding social capital*, di mana tenaga kerja India menciptakan jaringan pendukung (sekolah India, toko makanan, kuil) untuk bertahan hidup di lingkungan asing tanpa harus melebur sepenuhnya (News On Japan, 2025). Menurut (Alejandro Potres dan Min Zhou, 1993) dalam *Segmented Assimilation Theory* dapat diketahui bahwa imigran tidak selalu dapat berasimilasi langsung ke budaya dominan hal ini dipengaruhi kualitas pendidikan, diskriminasi dan kondisi sosial ekonomi yang membuat proses asimilasi ini bersifat non-linier dan tidak merata (EBSCO, 2024).

KESIMPULAN

Kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Jepang-India 2025 merupakan solusi terbaik untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang diakibatkan penuaan penduduk dan turunnya angka kelahiran. Melalui KTT ini, Jepang meningkatkan Program Specified Skilled Worker (SSW) dengan memperluas sektor pekerjaan menjadi 16 sektor, hal ini bertujuan untuk mengisi stagnasi di berbagai bidang pekerjaan di Jepang. Jepang memberikan berbagai fasilitas lebih bagi pekerja india agar kesepakatan ini saling menguntungkan bagi kedua negara. Dalam hal ini saran yang saya dapat berikan untuk mengoptimalkan hasil KTT adalah dengan meningkatkan Program Specified Skilled Worker (SSW) ataupun kebijakan lainnya yang bukan hanya memperluas akses sektor kerja secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas tata kelolanya melalui perlindungan hak pekerja, pengawasan rekrutmen, dan penguatan program pra-keberangkatan, sekaligus membangun mekanisme evaluasi berkala dan kerja sama jangka panjang di berbagai bidang, serta pertukaran teknologi agar arus tenaga kerja India benar-benar mampu menjaga produktivitas Jepang di tengah krisis demografi, tanpa mengabaikan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan hubungan bilateral.

Namun, efektivitas solusi tersebut dibatasi oleh resistensi sosial yang kuat, berakar pada ideologi homogenitas (*tan'itsu minzoku*), narasi “*Japanese First*”, dan meningkatnya sentimen anti-imigran yang dimanifestasikan dalam demonstrasi, wacana media negatif, serta stereotip bahwa imigran meningkatkan kriminalitas dan mengganggu harmoni sosial. Fenomena ini timbul lantaran masyarakat Jepang tidak mengenal konsep integrasi sosial seperti di Eropa sehingga imigran dituntut harus mengikuti norma-norma mayoritas. Serta proses adaptasi yang tidak mudah membuat warga asing di Jepang tidak dapat melebur secara penuh dengan budaya lokal dikarenakan perbedaan kualitas pendidikan, budaya atau kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi fenomena ini terjadi. Kondisi ini memunculkan diskriminasi, pelapisan sosial baru berbasis etnis dan keterampilan (antara jalur SSW dan jalur talenta digital), serta mendorong terbentuknya komunitas-komunitas tertutup seperti “*Little India*” di Tokyo sebagai bentuk perlindungan dan solidaritas internal. Saran lain yang dapat saya berikan adalah agar Pemerintah Jepang mengiringi implementasi kesepakatan KTT Jepang–India 2025 dengan strategi integrasi sosial yang jelas dan komprehensif, bukan hanya kebijakan penarikan tenaga kerja. Ini mencakup edukasi publik dan kampanye anti-diskriminasi untuk menantang narasi “*Japanese First*” dan stereotip negatif terhadap imigran, melalui penguatan program multikultural (pusat layanan, kegiatan lintas budaya, pendampingan komunitas) agar komunitas seperti “*Little India*” berfungsi sebagai jembatan dialog, serta penataan ulang skema SSW dan jalur talenta digital agar tidak memperdalam pelapisan sosial di antara migran, sehingga kerja sama tenaga kerja Jepang–India dipandang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil dan manusiawi dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, H., Nurrochmah, S., & Katmawanti, S. (2019). *Hubungan antara fertilitas, mortalitas, dan migrasi dengan laju pertumbuhan penduduk*. Preventia: The Indonesian Journal of Public Health, Vol 4(1), 15-22. <https://dx.doi.org/10.17977/um044v4i1p15-22>
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. Grasindo.
- Arbain, T. (2009). *Strategi migran Banjar*. LKiS.
- Bagaskoro, D. S., Alamsyah, F. A., & Ramadhan, S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Demografi: Fertilitas, Mortalitas Dan Migrasi (Literature Review Perilaku Konsumen)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol 2(3), 303-312. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Burgess, C. (2007). *Multicultural Japan? Discourse and the “myth” of homogeneity*. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Vol 5(3), Article 2389. <http://www.japanfocus.org/-Chris-Burgess/2389/article.html>
- CNBC Indonesia. (2025, 15 September). *Rencana “impor” pekerja India picu ketegangan baru di Jepang*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250915105122-128-666950/rencana-impor-pekerja-india-picu-ketegangan-baru-di-jepang>
- Dewi, Elisabeth. *Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR, vol. 9, no. 1, 2013, doi: 10.26593/jihi.v9i1.535.%p
- Dewi, U. N. M. (2024). *Migrasi dalam perspektif hubungan internasional*. Unisri Press.
- Socio Health Dual Labour Market Theory: Understanding Labor Migration to Advanced Economies. (2024, 15 Mei). <https://socio.health/population-and-development-issues-challenges/dual-labour-market-theory-labor-migration/>
- Fauzan, M. R., & Paramasatya, S. (2022). *Upaya Jepang dalam melindungi tenaga kerja asing pada Technical Intern Training Program*. Journal of International Relations, Vol 8(2), 239–247. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/33575/26723>

- News On Japan, 2025. *Foreign residents in Japan exceed 3.5 million, Tokyo's Indian community grows*. <https://newsonjapan.com/article/144558.php>
- Garap Media, 2025. *Warga Jepang demo besar tolak pekerja India*. <https://garapmedia.com/warga-jepang-demo-besar-tolak-pekerja-india/>
- Haryono, W. (2025, 1 Oktober). *Viral, imigran India bikin ulah di Jepang*. <https://www.metrotvnews.com/play/ba4Cz7jq-viral-imigran-india-bikin-ulah-di-jepang>
- Herzog, L. (2018). *Durkheim on social justice: The argument from "organic solidarity."* American Political Science Review, Vol 112(1), 112–124. <https://doi.org/10.1017/S000305541700048X>
- Ishimatsu, H. (2025). *Beyond multiculturalism? Rethinking Japan's "tabunka-kyōsei" through Axel Honneth's theory of recognition*. Frontiers in Sociology, Vol 10, 1653520. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1653520>
- BBC News Indonesia *Jepang: Kebangkitan partai sayap kanan Sanseito dan kemarahan atas 'invasi orang asing*. (2025, 21 Juli). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r95pn799vo>
- Kirana Meuthia, N., Firli Lee Homi, N., Naraya Arini, Y., & Renggali Mewangi, N. (22 Desember 2017). *Populasi penduduk Jepang terancam punah, kenapa? Lazuardi Global Compassionate School*. Diakses 1 Januari 2026, dari <https://lazuardi.sch.id/populasi-penduduk-jepang-terancam-punah-kenapa/>
- Kompas.com. (2025, 10 Agustus). *Krisis demografi di Jepang: Angka kematian 1 juta lebih tinggi dari kelahiran*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/10/183000265/krisis-demografi-di-jepang-angka-kematian-1-juta-lebih-tinggi-dari?page=all>
- Japan Workers, 2025. *Are crime rates of foreigner higher than those of Japanese?*. <https://www.japan-workers.com/?p=963>
- Mekari Community, 2025. *Mengapa Jepang memilih India sebagai negara untuk program pertukaran penduduk?*. <https://community.mekari.com/forums/topic/mengapa-jepang-memilih-india-sebagai-negara-untuk-program-pertukaran-penduduk/>
- Morgan, C. V., Zhang, J., Cichanowicz, T., & Welser, H. T. 2023. How anti-assimilationist beliefs are shaping the context of reception of immigrants in Japan. *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies*, Vol 23(1). https://www.japanesestudies.org.uk/ejcs/vol23/iss1/morgan_et_al.html
- Naim, M. (2013). *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau* (Cetakan ke-1). PT Rajagrafindo Persada.
- Geinokai BIJ – Big In Japan, 2024. *Navigating work culture in Japan: 8 keys foreign workers must know*. <https://geinokai.jp/blog/2024/02/19/work-culture-in-japan/>
- Nyoman, Suartha, and I. G. W. M. Yasa. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 10, no. 1, Februari. 2017, doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p10>.
- Pratama, 2025. *Kondisi pasar tenaga kerja saat ini di Jepang: Tantangan dan upaya mitigasi*. <https://www.janusa.id/news/current-labor-market-conditions-in-japan%3A-challenges-and-mitigation-efforts>
- Puspitasari, W. I., & Kusreni, S. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 49-64. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5505>.
- Romdiati, H. (2015). *Globalisasi migrasi dan peran diaspora: Suatu kajian pustaka*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89-100. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69>
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2008). *[BEBERAPA ASPEK SOSIOLOGI HUKUM]* (Edisi ke-2, Cetakan ke-2). P.T. Alumni.
- Bonnett, Aubrey W. (2024). *Segmented assimilation theory*. Research Starters: Social Sciences and Humanities – EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/segmented-assimilation-theory>
- Kompas.id, 2025. *Semakin banyak orang Jepang tolak imigran*.

- <https://www.kompas.id/artikel/sentimen-anti-imigran-menguat-di-jepang-osaka-dilanda-unjuk-rasa>
- Suara Surabaya, 2025. Krisis tenaga kerja di Jepang memburuk sejak pandemi Covid-19. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/krisis-tenaga-kerja-di-jepang-memburuk-sejak-pandemi-covid-19/>
- Wibisono, M. D., & Sasia, M. (2020). Pengembangan skala identitas sosial: Validitas, dan analisis faktor eksploratori. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 15(1), 58–67. <https://doi.org/10.30659/jp.15.1.58-67>
- Yong, C. (2018). Justifying resistance to immigration law: The case of mere noncompliance. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 31(2), 459–481. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2018.20>
- 経済産業省. (2025年8月29日). 武藤経済産業大臣が日印首脳会談に出席しました. <https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250829006/20250829006.html>